

PENGARUH E-PROCUREMENT TERHADAP TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE

Rieska Maharani

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Ardi Hamzah

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstract: *The purpose of this research are to examine effect variables about e-procurement of good governance. The respondents of the research at Pemkot Surabaya. Purposive sampling technique is chosen with criteria respondents at staff Pemkot Surabaya. Data has gathered by questionnaires and documentation. Sample total is 66 respondent. The result of research with partial regression indicate that cognitive style significantly effect on result of effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law, and accountability. The result of research with simultaneous regression indicate that perception about effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law, and accountability . The value R^2 is 66,6% indicate that perception about effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law, and accountability 66,6% on result of good governance, while 33,4% by other factors.*

Key words: *effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law, accountability and good governance.*

I. PENDAHULUAN

Good governance merupakan paradigma yang menegakkan pentingnya kesetaraan dan kerjasama hubungan antara pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), pengusaha dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Secara definitif *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004). Oleh karena itu, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi syarat mutlak terwujudnya Good Governance karena dengan keempat hal tersebut semua aktivitas publik dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak-hak publik dapat dipenuhi.

Kegiatan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengadaan barang/jasa (procurement) merupakan salah satu celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama ini di Negara Indonesia masih menggunakan pola lama yang memungkinkan terjadinya “kontak” antara pejabat yang bertanggungjawab dalam pengadaan dengan penyedia barang/jasa. Kontak inilah yang memungkinkan terjadinya “deal” sehingga pengadaan menjadi tidak ekonomis, efisien dan efektif. Survei beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari aparat pemerintahan untuk tidak melaksanakan secara *on-line*, karena mereka lebih menyukai metode pelayanan tradisional yang berupa tatap muka langsung, surat menyurat, ataupun telepon (Safrial, 2005).

Proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sebenarnya telah diatur secara terperinci dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang direvisi melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2004. Permasalahan yang timbul kemudian adalah terjadinya berbagai bentuk praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang secara “kemasan” telah memenuhi syarat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, namun prakteknya masih ada yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Hal tersebut diatas terjadi karena praktek pengadaan barang/jasa pemerintahan belum pada prinsip-prinsip *Good Procurement Governance* yang berbasis pada asas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Usaha pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi sangat diperlukan. Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Dalam kaitan proyek yang selama ini sering dituding sebagai biang keladi korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat diminimalisir dengan lelang melalui internet (*e-procurement*). Lelang melalui internet dinilai dapat memenuhi *Value for Money* (3E) sekaligus mengimplementasi *Good Governance* serta dapat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (Taufiq, 2004). Pada saat ini, aplikasi *e-procurement* disinyalir mampu menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total biaya tender, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional (Sulaiman, 2005)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip-prinsip *e-procurement* terhadap terwujudnya *good governance*. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip *e-procurement* dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang atau jasa disebut sebagai procurement. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, antara lain:

1. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa;

2. Pengguna barang atau jasa pemerintah adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan dengan kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;
4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh dana anggaran belanja rutin APBN.

Pengadaan barang atau jasa di pemerintah, meliputi seluruh kontrak pengadaan (departemen pemerintah, BUMN, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan, baik milik negara maupun swasta. Menurut Lubis (2006) tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan (procurement) meliputi tahap penilaian dan penentuan kebutuhan, tahap persiapan perencanaan dan persiapan dokumen tender, tahap seleksi peserta dan penentuan pemenang, tahap pelaksanaan pekerjaan serta tahap keuangan dan audit.

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dilingkungan instansi pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden RI wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip berikut: (a) efisien, (b) efektif, (c) bersaing, (d) transparan, (e) adil/tidak diskriminatif, dan (e) bertanggungjawab. Keenam prinsip tersebut yang dapat mendukung terciptanya pengadaan barang/jasa yang baik bebas dari KKN.

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*)

e-Procurement adalah suatu proses dimana seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan sebagian besar barang dan jasa dibeli secara elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah sebuah proses transaksi business-to-business (B2B) secara elektronik (otomatis) yang terjadi antara pembeli dan penjual yang melalui media elektronik.

Pada umumnya terdapat dua pihak yang terkait secara langsung dalam proses *e-procurement* pemerintah, namun hal tersebut tergantung dari kondisi masing-masing pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah (1) *procure* (instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan e-procurement), (2) *supplier* (pihak penyedia barang dan jasa). Setiap *procure* mempunyai wewenang untuk menentukan prosedur apa yang akan dipakai dalam melaksanakan e-procurement. Menurut Sanders dalam Sulinar (2006), terdapat tiga macam prosedur yaitu prosedur terbuka, prosedur terbatas dan prosedur negosiasi.

Secara praktek setiap negara dapat mengaplikasi *e-procurement*-nya berbeda tergantung dari kondisi dan situasi negara masing-masing. Akan tetapi menurut Graham dalam Sulinar (2006) pada umumnya *e-procurement* terbagi dalam 4 tahap yaitu (1) *Access to information about contract*, (2) *Pre-qualification*, (3) *Tendering*, (4) *Qualification and Debriefing*.

Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, bahwa *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik,

bersih dan berwibawa. Atas uraian tersebut wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang splid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dan menjaga kesinergian interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Good governance menjadi prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan serta cita-cita tersebut, maka terdapat sembilan prinsip utamagood governance yang diungkapkan oleh UNDP yang perlu dipahami dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah. Sembilan prinsip utama good governance yaitu: (1) *participation*, (2) *rule of law*, (3) *transparency*, (4) *responsiveness*, (5) *consensus orientation*, (6) *equity*, (7) *efficiency*, (8) *accountability*, (9) *strategic vision*. Kesembilan prinsip tersebut, merupakan bagian yang penting dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai *good governance*. Tiap prinsip diperlukan untuk mencapai prinsip yang baik.

Adapun manfaat yang dimiliki *good governance* (Effendi, 2007) yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang ditunjukkan oleh tidak adanya atau berkurangnya manipulasi pajak, pungutan liar, manipulasi tanah, pemalsuan dokumen, penggelembungan nilai kontrak, dan sebagainya;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, ditandai kelembagaan/ketatalaksanaan yang lebih baik, bersih, efektif, ramping dan fleksibel, hubungan kerja antar instansi pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik, administarsi pemerintahan dan kearsipan yang berkualitas, penyelamatan, pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip negara, serta hasil kerja organisasi dan prestasi pegawai yang semakin baik;
3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan berkurangnya peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, forum konsultasi publik, pemberantasan korupsi, dan pemberian penghaegaan atas kepedulian masyarakat;
5. Terjaminnya dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, serta berkurangnya perbuatan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya pemerintahan yang baik otomatis membuat pemerintahan itu sendiri dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya tindakan seperti KKN tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun.

Pengaruh E-procurement Terhadap Good Governance

Sebelum adanya *e-procurement*, pengadaan barang/jasa pemerintah masih memiliki kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya:

1. Tidak transparan/terbuka.
2. Tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus-menerus.
3. Ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir, serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan.

- H3 : Kompetisi dalam *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.
 H4 : Transparan dalam *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.
 H5 : Keadilan dalam *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.
 H6 : Bertanggungjawab dalam *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.
 H7 : *E-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surabaya. Sampel penelitian ini adalah pegawai Pemkot Surabaya yang pernah mengikuti kegiatan *e-procurement*. Pengumpulan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung kepada responden. Kuisioner yang disebar sebanyak 100, namun hanya 66 kuisioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis.

Analisis data meliputi pengujian instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan program SPSS 15 *for Windows*. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda yang persamaannya sebagai berikut:

$$GG = \alpha + \beta_1 En + \beta_2 Ef + \beta_3 B + \beta_4 T + \beta_5 A + \beta_6 Bt + \epsilon$$

Dimana :

- GG = *Good governance*
 En = Efisien
 Ef = Efektif
 B = Bersaing
 A = Adil
 T = Transparan
 Bt = Bertanggungjawab
 ϵ = *Error term*

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 4 item berupa biaya proses dan administrasi, kecepatan proses, kemudahan dan anggaran.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Variabel

- ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 2 item berupa kesesuaian dan manfaat.
3. Bersaing , berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 3 item berupa persaingan, standar, dan kerahasiaan.
 4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung, penunjukkan langsung) yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 4 item berupa ketentuan dan informasi, teknis administrasi, pemenang, dan terbuka.
 5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan tertentu. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 3 item yaitu perlakuan, ketentuan sama dan KKN.
 6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 2 item yaitu kinerja dan akses.
 7. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dan menjaga kesinergian interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari 9 item yang terdiri dari partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi, berkeadilan, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategi.

Metode Analisis

Berdasarkan pada hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang digunakan dengan regresi berganda. Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada item-item pertanyaan serta uji asumsi klasik terhadap variabel penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya. Hasil pengujian dengan *Pearson correlation* menunjukkan validitas pada skor masing-masing butir dengan skor totalnya. Untuk pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach alpha. Hasil pengujian menunjukkan data kuisioner adalah

reliabel. Dengan kata lain, data kuisioner yang terdapat pada Lampiran 4.1. adalah valid dan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang menggunakan normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,205. Nilai ini jauh diatas 0,01 yang menunjukkan data dalam penelitian ini ada;ah normal. (Lampiran 4.2)

Hasil Pengujian Regresi

Pengujian regresi dilakukan dengan regresi parsial dan pengujian simultan. Hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Lampiran 4.3. Hasil pengujian Regresi parsial menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh signifikan terhadap good governance. Ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 3,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Hasil ini mendukung hipotesis H1. Pengaruh efisiensi yang berpengaruh signifikan terhadap good governance, disebabkan dengan adanya e-procurement pemerintah dapat menggunakan dana, daya dan waktu dengan seminimal mungkin dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Untuk efektifitas tidak berpengaruh cesara signifikan terhadap good governance. Ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung 1,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,239. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H2. Pengaruh efektifitas yang tidak signifikan terhadap good governance dikarenakan dengan adanya pengadaan barang dan jasa baik secara tradisional maupun elektronik ternyata belum memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, pengadaan barang dan jasa hanya melihat apa yang dibutuhkan tanpa melihat guna barang atau jasa tersebut untuk masyarakat.

Untuk persaingan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan tergadap good governance, dengan nilai t-hitung sebesar 1,248 dan nilai signifikan sebesar 0,217. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis H3. Pengaruh persaingan yang tidak signifikan terhadap good governance dikarenakan persaingan yang kurang sehat masih terjadi walaupun telah menggunakan media elektronik atau internet. Selain itu juga masih ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa.

Untuk Transparansi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap good governance, dengan nilai t-hitung sebesar 2,491 dan nilai signifikansi sebesar 0,16. hasil ini mendukung hipotesis H4. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap good governance disebabkan adanya pengadaan barang dan jasa dengan mediaelektronik, dapat menciptakan transparansi. Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kebutuhan sampai dengan penentuan pemenang dan dana yang digunakan.

Untuk keadilan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan tergadap good governance, dengan nilai t-hitung sebesar 0,280 dan nilai signifikan sebesar 0,780. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis H5. Pengaruh persaingan yang tidak signifikan terhadap good governance dikarenakan masih adanya perlakuan yang tidak sama bagi penyedia barang dan jasa. Selain itu masih adanya pemberian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Untuk pertanggungjawaban menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan tergadap good governance, dengan nilai t-hitung sebesar 1,658 dan nilai signifikan sebesar 0,103. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis H6.

Pengaruh pertanggungjawaban yang tidak signifikan terhadap good governance dikarenakan pemerintah belum mencapai sasaran fisik, keuangan maupun manfaat baik bagi pemerintah sendiri maupun kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga belum memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian secara parsial yang menunjukkan hanya efisien dan transparansi yang berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Pengaruh efisiensi dan transparansi tersebut berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menghemat anggaran belanja daerah dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa.

Dengan pengujian regresi simultan menunjukkan bahwa prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan, transparansi, keadilan dan tanggungjawab dalam e-procurement berpengaruh signifikan terhadap good governance. Ini ditunjukkan dengan nilai F-hitung sebesar 19,621 dan nilai signifikansi sebesar 0,000... Nilai R² sebesar 66,6% menunjukkan bahwa efisiensi, efektifitas, persaingan, transparansi, keadilan dan tanggungjawab dalam e-procurement memberikan kontribusi sebesar 66,6% terhadap good governance, sedangkan 33,4% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam e-procurement berpengaruh secara signifikan terhadap good governance, sedangkan prinsip efektifitas, persaingan, keadilan dan tanggungjawab dalam e-procurement tidak berpengaruh secara signifikan.
2. Pengujian secara simultan menunjukkan prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan, transparansi, keadilan dan tanggungjawab dalam e-procurement berpengaruh signifikan terhadap good governance.
3. prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan, transparansi, keadilan dan tanggungjawab dalam e-procurement memberikan kontribusi sebesar 66,6% terhadap good governance, sedangkan 33,4% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Responden yang digunakan pada penelitian ini hanya pada Pemerintahan kota Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 66 responden.
2. Penelitian ini tidak menggunakan responden dari penyedia barang dan jasa, sehingga hanya dilihat dari segi pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan respon dari penyedia barang dan jasa.

2. Penelitian dilakukan di pemerintahan daerah lainnya yang menggunakan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Effendi, Taufiq. 2007. *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2007.
- Hamzah, Ardi. 2007. *Analisa Good Governance Dan Value For Money Dalam Perencanaan dan penganggaran Daerah*.
- Jasin, Moh dkk. 2007. *Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*. KPK. Jakarta.
- Kartikasari. 2007. *Pengaruh e-Procurement terhadap Pengadaan Barang pada Bagian Perlengkapan*. Univ. Bhayangkara Surabaya
- Keppres No.80 Tahun 2003. *Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Lubis, Todung Mulya. 2006. *Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Transparency Internasional Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2007. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah*.
- Pohan, Max H. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*.
- Pratolo, Surya. 2007. *Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasi Manajer, Pengendalian Intern Terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Konferensi Penelitian Akuntansi Sektor Publik Pertama. Surabaya
- Putranto, Suryadhi Joko. 2007. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*.
- Rahardjo, Agus. 2007. *E-Governance Awards 2007*. <http://www.wartaekonomi.co.id>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2007.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah*. Penerbit Aksara Satu. Surabaya.

Siagian, Erik. 2007. *Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Salah Satu Metode Pengadaan Barang/ Jasa yang Efisien dan Efektif.*

Lampiran 4.1

Correlations

		X 1.1	X 1.2	X 1.3	TotX 1
X 1.1	Pearson Correlation	1	,554**	,772**	,895**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	66	66	66	66
X 1.2	Pearson Correlation	,554**	1	,510**	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	66	66	66	66
X 1.3	Pearson Correlation	,772**	,510**	1	,880**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	66	66	66	66
TotX 1	Pearson Correlation	,895**	,809**	,880**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	66	66	66	66

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,823	3

Lampiran 4.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,95272887
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,131
	Negative	-,072
Kolmogorov-Smirnov Z		1,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,205

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Correlations

		Unstandardized Residual	Efisien (X1)	Efektif (X2)	Persaingan (X3)	Transparan (X4)	Keadilan (X5)	Tanggung (X5)
Spearman's r	Unstandardized Residual	1,000	-,061	-,153	,074	-,013	-,040	,068
	Correlation Coefficient		,628	,220	,553	,915	,750	,589
	Sig. (2-tailed)							
Efisien (X1)	Correlation Coefficient	-,061	1,000	,251*	,571*	,221	,476**	,260*
	Sig. (2-tailed)	,628		,042	,000	,074	,000	,035
	N	66	66	66	66	66	66	66
Efektif (X2)	Correlation Coefficient	-,153	,251*	1,000	,274*	,398**	,445**	-,007
	Sig. (2-tailed)	,220	,042		,026	,001	,000	,954
	N	66	66	66	66	66	66	66
Persaingan (X3)	Correlation Coefficient	,074	,571**	,274*	1,000	,499**	,542**	,428**
	Sig. (2-tailed)	,553	,000	,026		,000	,000	,000
	N	66	66	66	66	66	66	66
Transparan (X4)	Correlation Coefficient	-,013	,221	,398**	,499**	1,000	,455**	,204
	Sig. (2-tailed)	,915	,074	,001	,000		,000	,100
	N	66	66	66	66	66	66	66
Keadilan (X5)	Correlation Coefficient	-,040	,476**	,445**	,542**	,455**	1,000	,348**
	Sig. (2-tailed)	,750	,000	,000	,000	,000		,004
	N	66	66	66	66	66	66	66
Tanggung (X5)	Correlation Coefficient	,068	,260*	-,007	,428**	,204	,348**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,589	,035	,954	,000	,100	,004	
	N	66	66	66	66	66	66	66

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4.3**Model Summary^a**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,816 ^a	,666	,632	2,56177	1,829

a. Predictors: (Constant), Tanggung (X5), Transparan (X4), Efektif (X2), Efisien (X1), Keadilan (X5), Persaingan (X3)

b. Dependent Variable: GG (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	771,835	6	128,639	19,602	,000 ^a
	Residual	387,196	59	6,563		
	Total	1159,030	65			

a. Predictors: (Constant), Tanggung (X5), Transparan (X4), Efektif (X2), Efisien (X1), Keadilan (X5), Persaingan (X3)

b. Dependent Variable: GG (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,972	1,952		2,034	,046					
	Efisien (X1)	,690	,232	,347	2,974	,004	,678	,361	,224	,416	2,404
	Efektif (X2)	,294	,244	,116	1,205	,233	,528	,155	,091	,608	1,644
	Persaingan (X3)	,417	,333	,162	1,252	,215	,709	,161	,094	,339	2,952
	Transparan (X4)	,583	,234	,258	2,488	,016	,552	,308	,187	,526	1,903
	Keadilan (X5)	,073	,264	,034	,276	,784	,658	,036	,021	,363	2,753
	Tanggung (X5)	,597	,355	,161	1,684	,097	,554	,214	,127	,618	1,619

a. Dependent Variable: GG (Y)